

PENGARUH MANAJEMEN LABA, LIKUIDITAS, LEVERAGE DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Marwah Hajar Alam
marwah.ha27@gmail.com
Fidiana

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The population was Property and Real Estate manufacturing company which observed in 2013-2017. While, this research aimed to find out the effect of management profit, liquidity, leverage, independent commissioner and audit committee on the tax avoidance in annual financial statement of Property and Real Estate companies which were listed on Indonesia Stock Exchange. The sampling collection technique used purposive sampling in which the collection was based on criteria given. Moreover, there were 24 Property and Real Estate companies. In addition, the data analysis technique used multiple linear regression with SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) version 25. The research result concluded profit management, liquidity and audit committee did not affect on the tax avoidance. On the other, leverage had positive effect on the tax avoidance. Moreover, independent commissioner had negative effect on the tax avoidance. In brief, the variables which had affected on the tax avoidance were leverage and independent commissioner.

Keywords: Profit Management, Liquidity, Leverage, Corporate Governance, Tax Avoidance.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang berasal dari sektor properti dan *real estate* dengan tahun penelitian dimulai dari tahun 2013-2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh manajemen laba, likuiditas, *leverage*, komisaris independen, dan komite audit terhadap penghindaran pajak dalam laporan keuangan tahunan yang telah disusun oleh perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini didapatkan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling* pada perusahaan properti dan *real estate*. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan diperoleh sampel sebanyak 24 perusahaan properti dan *real estate*. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan program aplikasi komputer *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) versi 25. Hasil penelitian menggambarkan bahwa manajemen laba, likuiditas, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara garis besar variabel yang memiliki pengaruh terhadap penghindaran adalah *leverage* dan komisaris independen.

Kata kunci: Manajemen laba, Likuiditas, *Leverage*, *Corporate Governance*, Penghindaran pajak.

PENDAHULUAN

Salah satu sumber penyumbang pendapatan terbesar bagi sebuah negara, utamanya negara berkembang adalah pajak. Pemerintah tidak bisa jika hanya mengandalkan penerimaan yang berasal dari sumber daya alam dan kegiatan lainnya yang dikategorikan sebagai kegiatan non-pajak. Hal ini dikarenakan jumlahnya yang selalu fluktuatif dan cenderung tetap dari tahun ke tahun. Jika dibandingkan dengan kegiatan pajak jumlahnya selalu meningkat dari tahun ke tahun, oleh karenanya Pemerintah memfokuskan pada penerimaan yang berasal dari pajak (Swingly dan Sukartha, 2015).

Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak yang berkewajiban membayar pajak yang dihitung dari laba bersih. Semakin tinggi laba yang diperoleh oleh perusahaan, maka akan semakin besar pajak yang harus dibayarkan dan pendapatan negara juga akan semakin banyak. Namun hal ini menjadi permasalahan bagi perusahaan karena pajak merupakan

beban yang akan mengurangi laba bersih. Adanya perbedaan tujuan antara perusahaan dengan pemerintah dalam hal perpajakan menyebabkan sebuah pertentangan dimana perusahaan berusaha untuk mengefisienkan beban pajaknya agar memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam rangka mensejahterahkan para pemangku kepentingan serta kelangsungan hidup perusahaan, sedangkan pemerintah mengharapkan penerimaan yang berasal dari pajak semaksimal mungkin (Yoehana, 2013).

Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak badan atau pihak manajemen untuk melakukan upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak adalah suatu tindakan pengurangan utang pajak yang sifatnya legal dan tidak melanggar undang-undang perpajakan (Xynas, 2011). Penghindaran ini dikatakan sebagai permasalahan yang kompleks sekaligus unik sebab disatu sisi dapat ditoleransi atau diperbolehkan, tetapi disisi lain tidak menguntungkan (Budiman dan Setiyono, 2012).

Terdapat beberapa fenomena kasus penghindaran pajak yang terjadi pada sub sektor properti dan *real estate* di Indonesia. Kepala Seksi Hubungan Eksternal Dirjen Pajak, Chandra Budi, menyatakan bahwa sesuai dengan hasil uji silang data *Real Estate* Indonesia (REI) pada tahun 2010-2012, ditemukan adanya potensi penerimaan pajak penghasilan (PPh) tidak termasuk PPN sebesar Rp 30 triliun, namun pada kenyataannya pajak yang disetorkan oleh sub sektor properti dalam periode diatas hanya sebesar Rp 9 triliun (*detik.com*). Penelitian Hanafi dan Harto (2014) menjelaskan Pertumbuhan sub sektor properti dan *real estate* pada tahun tersebut mengalami peningkatan yaitu pada 2010 dari 29% naik 32% di tahun 2011 dan 51% pada 2012, tetapi tidak disertai dengan meningkatnya *effective taxes rate*.

Perusahaan yang berfokus pada laba akan terus berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal melalui berbagai macam efisiensi biaya salah satunya adalah efisiensi biaya pajak dengan cara melakukan perencanaan pajak. Hal ini merupakan langkah awal dari manajemen laba. Upaya manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan melakukan intervensi terhadap penyusunan laporan keuangan tujuannya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Manajemen laba menjadi sarana untuk memenuhi kewajiban pajak dengan benar, namun jumlah pajak yang akan dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk tetap dapat menghasilkan laba (Silvia, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Supramono (2012) berpendapat bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2014) menunjukkan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Penelitian terdahulu (Suyanto dan Supramono, 2012:168) menjelaskan terdapat prediksi bahwa likuiditas perusahaan akan mempengaruhi tingkat penghindaran pajak, dimana jika tingkat likuiditasnya tinggi, maka perputaran kasnya baik diikuti dengan lancarnya arus kas perusahaan, maka perusahaan tidak berkeinginan membayar pajak sesuai dengan ketepatan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Fikriyah (2014) mengatakan bahwa likuiditas yang menunjukkan adanya uang yang menganggur menyebabkan tidak produktifnya perusahaan. Namun jika likuiditasnya rendah maka akan mengurangi tingkat kepercayaan kreditur dan mengakibatkan menurunnya tingkat pinjaman modal oleh kreditur, maka perusahaan akan menjaga tingkat likuiditasnya sehingga tidak menyebabkan perilaku penghindaran pajak.

Rasio keuangan lain yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak adalah *leverage*. *Leverage* merupakan suatu ukuran dimana perusahaan memanfaatkan pembiayaan yang berasal dari utang. Kaitanya dengan pajak yaitu, apabila sebuah perusahaan memiliki tanggungan kewajiban pajak yang tinggi, maka utang yang dimiliki perusahaan juga tinggi sehingga menyebabkan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh perusahaan mampu dibiayai oleh hutang dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajibannya dengan memanfaatkan ekuitas yang dimiliki yaitu rasio *Debt to Equity Ratio (DER)*. Semakin tinggi DER nya

menunjukkan bahwa komposisi total utang lebih besar dibandingkan dengan total modal yang dimiliki, sehingga berdampak pada beban perusahaan kepada pihak luar semakin besar pula. Hal ini menyebabkan perusahaan akan bergantung pada pihak luar untuk mendapatkan sumber modal. Perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan menggunakan utang menyebabkan adanya beban bunga yang harus dibayarkan. Semakin besar utang yang dimiliki oleh perusahaan, semakin besar pula beban bunganya yang ditanggung dan hal itu berpengaruh terhadap berkurangnya beban pajak (Dharma dan Ardiana, 2016). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dewinta dan Setiawan, 2016) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian Marfirah dan Syam (2016) menyatakan sebaliknya.

Selain rasio keuangan dan manajemen laba, yang menjadi alat analisa mengenai keterkaitan dengan penghindaran pajak adalah *corporate governance*. *Corporate governance* dapat memberikan respon positif kepada investor. Hal ini disimpulkan bahwa semakin baik mekanisme pengelolaan perusahaan, maka semakin bagus pula respon investor kepada perusahaan. Oleh karena itu *corporate governance* sangat berkaitan dengan pemerintah dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan pada setiap perusahaan. Penelitian yang dilaksanakan oleh Indrawan (2016) mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Dimana jika nilai CETR tersebut tinggi menandakan bahwa penghindaran pajak rendah, sebaliknya jika nilai CETR rendah maka penghindaran pajaknya tinggi. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa *corporate governance* yang diprosikan menggunakan mekanisme tata kelola komisaris independen dan komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Banyaknya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan menandakan bahwa *corporate governance* belum seutuhnya dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan *go public* di Indonesia. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, permasalahan dalam penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut: Apakah manajemen laba, likuiditas, *leverage* dan *corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh manajemen laba, likuiditas, *leverage* dan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Agensi

Teori agensi atau teori keagenan merupakan suatu konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara manajemen (*agent*) dengan pemilik perusahaan (*principals*). *Agent* memiliki kewajiban untuk mengurus perusahaan dengan sebaik-baiknya. Tanggung jawab yang berat, menyebabkan *agent* menuntut *principals* untuk memperoleh kompensasi sesuai dengan keinginan *agent*. Hanggraeni (2014:68) menyatakan bahwa konflik antara *agent* dengan prinsipal disebabkan oleh *asymmetric information* dimana adanya ketidak seimbangan informasi antara prinsipal dan *agent*. Di Indonesia memberlakukan sistem pemungutan pajak *self assessment system*, dengan pemberlakuan sistem ini memberikan peluang bagi *agent* untuk dapat menghitung sendiri penghasilan kena pajaknya sehingga dapat meminimalkan pajak penghasilannya. Dalam penelitian ini dapat disambungkan kepentingan laba didalam perusahaan yaitu antara pembayaran pajak (pihak manajemen) dengan pemungut pajak (*fiskus*). Pemungut atau pemotong pajak mengharapkan adanya pemasukan besar-besaran yang berasal dari pemotong pajak, sementara dari *agent* beranggapan berbeda yaitu perusahaan harus mampu menciptakan laba yang tinggi dengan beban pajak yang rendah. Kedua sudut pandang yang berbeda inilah, yang menimbulkan pertentangan antara *fiskus* sebagai pemotong pajak dengan pihak manajemen sebagai pembayar pajak (Prakosa, 2014).

Penghindaran Pajak

Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan sebagai wajib pajak badan, dimana pemerintah mengharapkan penerimaan negara yang berasal dari pajak dalam jumlah yang besar namun bertolak belakang dengan perusahaan menginginkan pembayaran pajaknya seminimal mungkin (Tandean, 2014). *Tax avoidance* adalah suatu kegiatan dalam perencanaan kegiatan transaksi untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam ketentuan pajak yang dilakukan secara legal (Septiarini, 2017). Praktik penghindaran pajak ini sering kali dilakukan melalui kebijakan yang ambil oleh manajemen. Pengukuran penghindaran pajak dalam ini penelitian ini menggunakan *cash effective tax rate* (CETR). CETR yaitu kas yang berasal dari aktivitas operasional yang dikeluarkan untuk biaya pembayaran pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Budiman dan Setiyono, 2012). Apabila nilai CETR nya kurang satu maka perusahaan tersebut terindikasi melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya jika nilai CETRnya lebih dari satu maka tindak terindikasi melakukan penghindaran pajak. Perusahaan banyak yang melakukan penghindaran pajak disebabkan oleh keinginan untuk mengurangi beban pajaknya. Tetapi hal tersebut dapat memberikan dampak buruk bagi perusahaan. Dampak buruk tersebut adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja perusahaan.

Manajemen Laba

Manajemen laba merupakan tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk menaikkan ataupun menurunkan laba perusahaan dalam periode berjalan tanpa menimbulkan dampak pada penurunan ataupun kenaikan laba ekonomis dalam jangka panjang (Novitasari, 2017). Semakin tinggi manajemen laba dalam perusahaan, maka semakin tinggi konflik kepentingan yang terjadi antara principal dan *agent*. Oleh karenanya, manajemen selalu berusaha menonjolkan prestasinya melalui pencapaian laba yang dicapai (Priantara, 2013). Dalam prakteknya, manajemen termotivasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui sebuah penghargaan contohnya bonus gaji, pengangkatan jabatan dimana imbalan ini diberikan atas kinerja laba perusahaan. Jika intensif ini diberikan kepada manajemen maka manajemen akan tergoda untuk melakukan tindakan sesuai dengan keinginannya sendiri dan mengesankan para pemangku kepentingan mengenai kinerja yang baik yang dicerminkan oleh manajemen laba. Menurut Scott (2012) terdapat pola dalam manajemen laba: (1) *taking a bath* pola ini terjadi ketika dalam perusahaan terjadi pergantian manajemen; (2) *income minimization* dilakukan pada saat perusahaan mendapatkan profitabilitas tinggi sehingga pada periode mendatang labanya diperkirakan turun agar tidak mendapat perhatian dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan; (3) *income maximization* dilakukan dengan menjadikan laba pada periode berjalan lebih tinggi dari perolehan laba sebenarnya. Tujuannya pola ini adalah agar manajer memperoleh bonus besar; (4) *income smoothing* dilakukan dengan cara perataan laba yaitu laba dari periode ke periode relatif konsisten karena investor cenderung lebih respek jika labanya stabil.

Likuiditas

Likuiditas adalah tolak ukur kesanggupan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang dicerminkan oleh aktiva lancarnya relatif terhadap utang lancarnya. Likuiditas dapat digunakan untuk memperhitungkan dampak yang berasal dari ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas dalam penelitian ini dapat diukur dengan *current ratio*. Rasio lancar menjelaskan bahwa besarnya kas yang dimiliki oleh perusahaan dalam satu periode akuntansi terhadap utang-utang jangka pendek yang telah jatuh tempo dimana hal tersebut tercermin dalam laporan posisi keuangan (Hanafi dan Halim; 2012). Pendapat Suyanto dan Supramono (2012:168) menyatakan apabila sebuah perusahaan yang memiliki rasio lancar tinggi menggambarkan bahwa perusahaan mampu memenuhi utang lancarnya. Hal ini menerangkan bahwa perusahaan dalam keadaan

yang sehat dan tidak mempunyai masalah mengenai *cash flow* sehingga mampu menanggung biaya-biaya yang muncul seperti biaya pajak. Penelitian yang dilakukan Putri (2014), membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki likuiditas yang baik, tidak merealisasikan pajak demi tujuan untuk meminimalisasi biaya.

Leverage

Hasil penelitian Hidayat (2017) mengatakan bahwa *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh hutang, dimana hal itu berarti seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasinya, sedangkan dalam prakteknya untuk menutupi kekurangan dana yang dibutuhkan perusahaan memiliki beberapa pilihan sumber dana yang dapat digunakan, salah satu sumber dananya adalah modal pinjaman atau yang disebut dengan hutang. Untuk mengukurnya digunakan proksi yang disebut *Debt to Equity Ratio* (DER). Rasio keuangan ini melukiskan kemampuan perusahaan dalam menggunakan modal yang tersedia untuk melunasi pembayaran kembali utang yang ada, semakin tinggi nilai DER maka semakin tinggi risiko keuangan yang dihadapi perusahaan. Semakin tinggi DER menunjukkan komposisi total kewajiban (lancar dan jangka panjang) semakin besar dibandingkan dengan total ekuitas. Akibatnya beban perusahaan terhadap pihak eksternal semakin besar. Selain itu juga besarnya beban utang dalam hal ini adalah beban bunga yang dikenakan kepada perusahaan dapat menurunkan jumlah keuntungan yang diterima perusahaan sehingga beban pajaknya juga akan ikut turun.

Corporate Governance

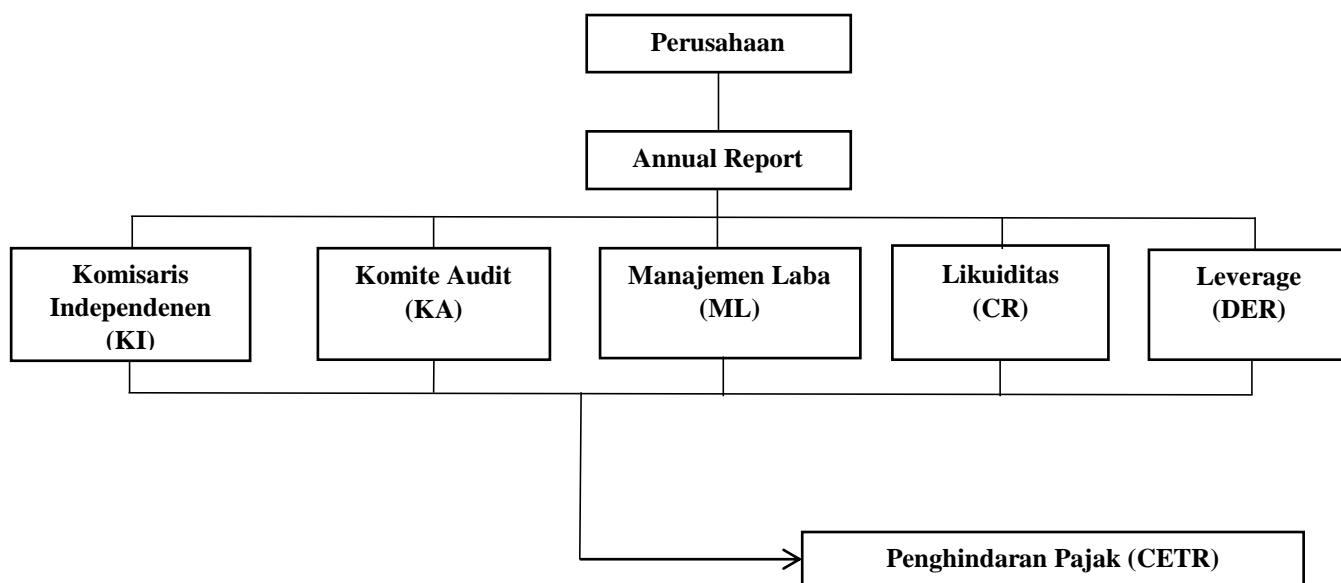
Adalah seperangkat kebijakan yang menentukan hubungan antara pihak internal perusahaan dan pihak eksternal perusahaan untuk bekerjasama dalam mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (Saputra dan Asyik, 2017). Peran tata kelola ini dapat membawa perusahaan untuk taat sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Hidayati dan Fidiana, 2017). Oleh sebab itu, peningkatan *corporate governance* dapat diibaratkan sebagai nilai tambah bagi perusahaan dan dapat meningkatkan target kinerja yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka pendek ataupun jangka panjang dimasa yang akan datang.

Mekanisme Corporate Governance, mekanisme dapat diartikan sebagai langkah dan hubungan yang jelas dan nyata antara pihak yang melakukan pengawasan dengan pihak pengambil keputusan terhadap keputusan yang diambil yang terdiri dari pengendalian internal dan pengendalian eksternal (Hanggraeni, 2014:61-83). Mekanisme *corporate governance* dalam penelitian ini adalah komite audit dan komisaris independen.

Pertama, komite audit, dibangun oleh dewan komisaris yang memiliki tanggung jawab sebagai pengendali didalam perusahaan dalam proses audit serta memantau dan memeriksa laporan keuangan (Hanggraeni, 2014). Fungsi komite audit sangatlah esensial dalam menjaga kredibilitas penyusunan laporan keuangan sama halnya seperti melindungi terciptanya sistem pengawasan perusahaan dalam terlaksananya *corporate governance* (*Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), 2001*). Oleh karenanya komite audit sangat penting bagi perusahaan karena sebagai mata dan telinga dewan komisaris dalam melakukan pengawasan.

Kedua, komisaris independen, merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari pihak eksternal perusahaan dimana tidak memiliki hubungan khusus dengan anggota direksi, investor utama ataupun anggota komisaris lainnya (Hidayati dan Fidiana, 2017). Pada dasarnya, kedudukannya sama seperti komisaris pada umumnya, yang membedakan adalah adanya hubungan khusus dengan dewan komisaris lain. Dengan adanya dewan komisaris dapat meningkatkan kualitas fungsi pengawasan dalam perusahaan sehingga konflik kepentingan yang terjadi didalamnya dapat dikurangi dengan kontrol yang tepat.

Rerangka Pemikiran



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak

Salah satu alasan perusahaan melakukan manajemen laba adalah pajak (Putri, 2014). Bagi perusahaan pajak menjadi masalah dalam laba bersih yang mereka peroleh sebab pajak dapat mengurangi laba bersihnya. Sebab perusahaan akan mengungkapkan laba sesuai dengan tujuannya baik melalui *income increasing* ataupun *income decreasing*. Apabila ingin mengurangi beban pajak terutang maka perusahaan melakukan *income decreasing*. Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2014) menunjukkan bahwa manajemen laba dijadikan alat untuk perusahaan agar dapat menghindari pajak. Novitasari (2017) mengatakan bahwa semakin tinggi perusahaan melakukan *income decreasing*, semakin tinggi pula perilaku agresifnya terhadap pajak dengan kata lain semakin tinggi perilaku penghindaran pajaknya.

H₁: Manajemen laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Supramomo (2012) mengatakan bahwa perusahaan yang sedang mengalami kesulitan likuiditas dimungkinkan tidak akan mentaati peraturan perpajakan dan cenderung melakukan penghindaran pajak. Perusahaan dengan likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa tingginya kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang lancar. Hal ini mencerminkan perusahaan dalam kondisi yang sehat dari segi keuangan dan tidak memiliki masalah arus kas sehingga perusahaan mampu memenuhi biaya-biaya yang muncul seperti pajak.

H₂: Likuiditas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

Rasio *leverage* adalah rasio yang menandakan bahwa besarnya modal dari pihak luar yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionlanya. Husnaini *et al.*, (2013) mengemukakan bahwa kebijakan pendanaan sebuah perusahaan akan mempengaruhi tariff pajak efektif hal ini di karenakan pajak memiliki perlakuan yang berbeda terkait dengan struktur modal. Perusahaan tidak hanya mendapatkan sumber pendanaan yang berasal dari modal sendiri melainkan bisa yang berasal dari utang. Dengan sumber pendanaan yang berasal dari utang dapat mengakibatkan muncul beban tetap yaitu beban bunga. Penelitian yang dilakukan oleh Adelina (2012), Prakosa (2014) dan Ozkan (2001) mengatakan

penambahan jumlah utang akan menyebabkan beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan akan bertambah pula. Komponen beban bunga inilah yang akan mengurangi laba sebelum pajak, sehingga beban pajak yang harus dibayar berkurang. Semakin banyak perusahaan memiliki utang maka beban bunga yang ditanggung juga tinggi dan akan dapat mengurangi laba. Perusahaan pada umumnya lebih mengandalkan pembiayaan yang berasal dari utang daripada modal sendiri untuk operasionalnya, namun nilai ETR (*Effective Tax Rate*) rendah.

H₃: *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Dalam sebuah perusahaan komisaris independen memiliki fungsi sebagai pengawas dalam manajemen tujuannya adalah untuk menyeimbangkan keputusan yang diambil oleh manajemen dengan pihak lain yang berkepentingan. Selain mengawasi manajemen, komisaris independen juga memantau kebijakan akuntansi yang digunakan manajemen dimana hal itu memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba. Effendi (2016:36) wewenang komisaris independen dalam menetapkan dipatuhi dan diterapkannya prinsip dan praktik GCG (*Good Corporate Governance*) dengan baik yaitu menjamin transparansi laporan keuangan, patuh terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku, menjamin akuntabilitas perusahaan. Hasil penelitian Diantari dan Ulupui (2016) mengatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya keberadaan komisaris independen telah melakukan tugasnya secara efektif dalam mencegah praktik-praktik kecurangan dalam perusahaan, salah satunya penghindaran pajak dan pelaksanaan *corporate governance* telah berjalan dengan baik. Apabila proporsi komisaris independen semakin banyak, diharapkan semakin praktik penghindaran pajak semakin kecil.

H₄: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Adanya komite audit dalam perusahaan mampu meminimalkan kecurangan dalam laporan keuangan yang dilakukan manajemen. Tugas komite audit adalah melakukan pengawasan terhadap auditor internal dan eksternal serta memastikan bahwa manajemen mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan dengan tepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian dan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang telah dijalankan (Hanggraeni, 2015:80). Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Susanto (2015) menghasilkan komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian Rosalia (2017) juga menunjukkan komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dengan memiliki komite audit perusahaan dapat melakukan pengendalian terhadap laporan keuangan yang efektif dan mendorong tercapainya *corporate governance*. Peran komite audit dapat membawa perusahaan untuk taat pada aturan perpajakan. Diasumsikan bahwa perusahaan yang melakukan *corporate governance* akan mengurangi perilaku *tax avoidance* karena memiliki sistem monitoring dan kontrol yang baik.

H₅: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi (Objek) Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian *kausal komparatif* tujuannya menganalisis kemungkinan adanya hubungan sebab akibat dengan cara menyelidiki dan menggali kembali faktor yang mungkin terjadi melalui data tertentu antara dua variabel atau lebih. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan properti dan *real estate* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2013 hingga tahun 2017 yaitu sejumlah 41 perusahaan. Namun, karena keterbatasan waktu, tenaga dan keuangan serta

terdapat kriteria tertentu dalam proses pengambilan sampel, maka yang digunakan dalam penelitian hanya sejumlah 24 perusahaan.

Teknik Pengumpulan Sampel

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan sampel yang didasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu. Adapun kriteria-kriteria yang akan dipilih adalah sebagai berikut: (1) Perusahaan Sektor Properti dan *Real Estate* yang konsisten tercatat di Bursa Efek Indonesia yaitu dalam lima tahun berturut-turut selama periode 2013-2017; (2) Perusahaan Property dan *Real Estate* yang mempublikasikan laporan keuangan dalam *annual report* dan memuat data lengkap yang diperlukan dalam variabel penelitian selama periode 2013-2017; (3) Perusahaan Property dan *Real Estate* yang memiliki nilai laba positif agar tidak mengakibatkan nilai *Cash Effective Tax Rate (CETR)* terdistorsi; (4) Perusahaan Property dan *Real Estate* yang memiliki nilai *Cash Effective Tax Rate (CETR)* dibawah dari satu, agar dalam estimasi model tidak terjadi masalah.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis Data yang digunakan adalah data dokumenter, dengan sumber datanya berasal dari sumber data sekunder, karena diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, kemudian dikumpulkan oleh peneliti. Sumber data yang dimaksud adalah Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit dan Laporan Keuangan Tahunan perusahaan dapat diperoleh dengan mengakses *website* Bursa Efek Indonesia *www.idx.co.id*.

Variabel dan Definisi Operasional

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Upaya meminimalisasi pajak dimana memiliki perencanaan yang tidak melanggar undang-undang perpajakan yang disebut *tax avoidance*. Dalam penelitian ini dikukur dengan menggunakan model *Cash Effective Tax Rate (CETR)* yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan. Semakin rendah nilai CETRnya maka semakin tinggi perusahaan melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, jika nilai CETRnya lebih dari satu maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. CETR diprosikan dengan rumus menurut (Dyreg *et al.*, 2008).

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

Variabel Independen

Manajemen Laba (ML)

Manajemen laba adalah tindakan yang dilakukan oleh manajemen dengan tujuan memangkas laba sesuai dengan keinginannya. Proksi manajemen laba dalam penelitian adalah dengan menggunakan nilai *Discretionary Accruals (DA)* dengan menggunakan model Modified Jones (1991) yang dimodifikasi oleh Dechow *et al.* (1995). *Discretionary accruals* adalah nilai yang dapat dimodifikasi karena tidak memerlukan bukti secara fisik (Cinthya dan Indriani, 2015). Semakin tinggi manajemen laba yang ada dalam perusahaan maka akan semakin tinggi konflik yang terjadi, maka tingkat penghindaran juga akan semakin tinggi. Perhitungan *Discretionary Accruals* dapat dijabarkan dalam tahap-tahap berikut:

Menghitung total *accruals (TAC)* dengan rumus:

$$NI_{it} - CFO_{it}$$

NI_{it} : Laba bersih perusahaan i pada periode t
 CFO_{it}: Arus kas operasi perusahaan i pada periode t

Menghitung estimasi akrual dengan persamaan OLS (*Ordinary Least Square*) dengan rumus

$$TAC_{it} / A_{it-1} = \alpha_1 (1 / A_{it-1}) + \alpha_2 (\Delta REV_{it} / A_{it-1}) + \alpha_3 (PPE_t / A_{it-1}) + e$$

TAC_{it} : Total accruals perusahaan i pada tahun t
 A_{it-1} : Total asset untuk sampel perusahaan i pada tahun t₁
 ΔREV_{it} : Perubahan pendapatan/penjualan perusahaan i dari tahun t₋₁ ke tahun t
 ΔREC_{it} : Perubahan piutang perusahaan i dari tahun t₋₁ ke tahun t
 PPE_t : Aktiva tetap perusahaan
 e : Error

Perhitungan nilai NDA (*Non Discretionary Accruals*) regresi linear sederhana dengan persamaan:

$$NDA_{it} = \alpha_1 (1 / A_{it-1}) + \alpha_2 ((\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}) / A_{it-1}) + \alpha_3 (PPE_{it} / A_{it-1})$$

NDA_{it} : Non discretionary accruals perusahaan i pada tahun t
 α : Fitted coefficient yang diperoleh dari hasil regresi pada perhitungan total accruals

Menghitung nilai *discretionary accruals* dengan persamaan:

$$DAC_{it} = (TAC_{it} / A_{it-1}) - NDA_{it}$$

DAC_{it} : Discretionary accruals perusahaan i pada periode t

Likuiditas

Likuiditas adalah sebuah ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam penelitian ini, likuiditas diproksikan dengan *current ratio*. Semakin likuid sebuah perusahaan maka semakin besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pengukurannya menggunakan rumus menurut Sutrisno (2009:216):

$$Current\ ratio = \frac{Aktiva\ Lancar}{Hutang\ Lancar} \times 100\%$$

Leverage

Pengukuran *leverage* menggunakan rasio *Debt to Equity Ratio* (DER). Rasio ini mencerminkan sejauh mana modal yang dimiliki mampu untuk melunasi utang-utang perusahaan terhadap pihak eksternal. Semakin tinggi utang maka beban bunga yang didapatkan perusahaan semakin tinggi pula, sehingga beban pajaknya menjadi kecil. Rasio ini diproksikan dengan rumus menurut Harahap (2010).

$$DER = \frac{Total\ Utang}{Total\ Ekuitas} \times 100\%$$

Corporate Governance

Corporate governance adalah sebuah tata kelola yang digunakan untuk mengawasi dan mengendalikan perusahaan. Penerapan tata kelola ini, mampu meningkatkan nilai tambah perusahaan dimata para investor, semakin baik mekanisme *corporate governance* maka semakin baik respon investor terhadap perusahaan. Penelitian ini menggunakan dua proksi yaitu komisaris independen dan komite audit dalam mengukur *corporate governance*. Semakin banyak proporsi komisaris independen maka diharapkan semakin rendah penghindaran pajak. Komposisi proksi komisaris independen yang pernah digunakan oleh Ariawan dan Setiawan (2017) dalam penelitiannya diukur dengan rumus:

$$K_i = \frac{\text{jumlah komisaris independen}}{\text{jumlah seluruh anggota dewan komisaris}}$$

Sedangkan komite audit, semakin banyak komite audit dalam perusahaan, maka semakin tidak transparan dan penghindaran pajak bisa terjadi. Komite audit yang pernah digunakan dalam penelitian oleh Fahriani dan Priyadi (2016).

$$K_a = \frac{\text{jumlah komite audit di luar komisaris independen}}{\text{jumlah komite audit dalam perusahaan}}$$

Teknik Analisis Data Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah uji statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan mengumpulkan data tanpa bermaksud untuk menarik kesimpulan yang sifatnya generalisasi (Sugiyono, 2014:206). Tujuannya adalah untuk memberikan informasi mengenai penggunaan variabel dalam sebuah penelitian. Informasi yang disajikan meliputi nilai minimum, nilai maksimum, *mean* (rata-rata), standar deviasi dengan variabel dependen penghindaran pajak dan variabel independen yaitu manajemen laba, likuiditas, *leverage* dan *corporate governance* yang mekanismenya diwakili oleh komisaris independen dan komite audit.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah pengujian statistik harus di lakukan dalam model regresi berganda dimana hal ini bertujuan untuk menyelidiki dugaan-dugaan yang ada dalam permodelan data penelitian:

Uji Normalitas, uji normalitas bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal dalam model regresi (Ghozali, 2016:154). Pengujian asumsi normalitas memiliki dua cara pada persamaan regresi yang dihasilkan dalam menilai data variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Apakah residual berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal: 1) Analisis grafik: metode dengan melihat *normal probability plot* dimana membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal intinya dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal dari grafik dan 2) Analisis statistik: menggunakan uji *kolmogorovsmirnov one sampel test* (Ghozali, 2016:154-158). Dengan hipotesis: a) bila nilai signifikansi < 0,05 maka H₀ ditolak atau data residual terdistribusi tidak normal; b) bila nilai signifikansi > 0,05 maka H₀ diterima atau data residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas, dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi atau hubungan antara variabel bebas dengan variabel terhadap variabel bebas lainnya. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2013). Ada tidaknya Multikolinearitas dapat diuji dengan melihat nilai dari *tolerance value* atau nilai *variance inflation factor* (VIF). Jika VIF > 10 dan nilai *tolerance* < 0,10 berarti antar variabel independen terjadi korelasi atau ada multikolinearitas, sedangkan jika VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,10 berarti antar variabel independen tidak terjadi korelasi atau tidak mengandung multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas, untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual pada setiap pengamatan. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain disebut homoskedastisitas. Namun jika varian ada perbedaan disebut heterokedastisitas. Dasar analisis ujinya adalah apabila terdapat pola tertentu seperti titik-titik dan membentuk suatu pola tertentu yang teratur (misalnya: bergelombang lalu melebar kemudian menyempit) maka telah terjadi heterokedastisitas, sedangkan apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan kebawah dari angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi, uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t' (sebelumnya) (Ghozali, 2013). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem. Penyakit data ini muncul disebabkan adanya observasi yang beraturan sepanjang waktu sehingga ada keterkaitan satu dengan lainnya. Model regresi yang baik adalah yang terbebas dari autokorelasi. Pendapat Santoso (2009:219) untuk mendeteksi adanya autokorelasi, bisa menggunakan dasar analisis dengan menggunakan *Durbin-Watson*: a) jika hasil Dw dibawah -2 ($Dw < -2$) maka terdapat autokorelasi positif; b) jika hasil Dw berada diantara -2 sampai $+2$ maka tidak terdapat autokorelasi; c) jika Dw diatas $+2$ ($Dw > +2$) maka terdapat autokorelasi negatif.

Pengujian Hipotesis

Model Regresi Berganda, analisis regresi linear berganda adalah hubungan linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen (Ghozali, 2013). Tujuan analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dengan variabel dependen. Serta untuk memprediksi nilai dari variabel dependen jika nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Bentuk persamaan linier berganda adalah sebagai berikut:

$$CETR = \alpha + \beta_1 ML + \beta_2 CR + \beta_3 DER + \beta_4 KI + \beta_5 KA + e$$

Uji F (Uji Kelayakan Model), untuk menguji H_0 bahwa data observasi memiliki kecocokan atau sesuai dengan model regresi. Yang berarti tidak adanya perbedaan antara model dengan data, sehingga model regresi dinyatakan cocok atau fit dengan kata lain layak untuk dilakukan uji hipotesis. Pengambilan keputusan uji kelayakan model adalah: a) Jika nilai *goodness of fit statistic* $< 0,05$ maka H_0 ditolak, yang berarti terdapat perbedaan antara model dengan nilai observasinya sehingga model penelitian diestimasi sesuai atau layak untuk digunakan; b) Jika nilai *goodness of fit statistic* $> 0,05$ maka H_0 diterima yang berarti bahwa model mampu memprediksi nilai observasinya sehingga model penelitian yang diestimasi tidak layak atau sesuai untuk digunakan.

Koefisien Determinasi (Uji R^2), uji R^2 merupakan ukuran penting dalam regresi, karena dapat memberikan informasi baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi, dengan kata lain angka tersebut dapat mengukur seberapa dekat garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Apabila nilai R^2 kecil menandakan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 artinya variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam memprediksikan variabel dependen (Ghozali, 2016).

Uji t (Uji Hipotesis), uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:97). Uji t dilakukan dengan melihat nilai signifikansi t pada *output* hasil regresi dengan *significance level* $0,05$ ($\alpha = 5\%$). Kriteria keputusannya: a) jika $t > 0,05$ maka H_0 diterima yang berarti bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen; b) jika $t < 0,05$ maka H_0 ditolak yang berarti bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Hasil analisis deskriptif dalam tabel 1 dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Variabel penghindaran pajak (CETR) memiliki *mean* sebesar 9,12382. Memiliki nilai minimum sebesar 0,015 dan nilai maksimum sebesar 38,298. Sedangkan nilai standar deviasinya sebesar 8,960423; (2) Variabel manajemen laba (ML) memiliki nilai *mean* sebesar 0,04306. Memiliki nilai minimum sebesar -0,819 dan nilai maksimum sebesar 5,595. Sedangkan nilai standar

deviasinya sebesar 0,141118; (3) Variabel likuiditas (CR) memiliki *mean* sebesar 238,2024. Memiliki nilai minimum sebesar 24,05 dan nilai maksimum sebesar 880,10. Sedangkan nilai standar deviasinya sebesar 165,94243; (4) Variabel *leverage* (DER) memiliki *mean* sebesar 84,0855. Memiliki nilai minimum sebesar 6,81 dan nilai maksimum sebesar 370,10. Sedangkan nilai standar deviasinya sebesar 56,95660; (5) Variabel komisaris independen (KI) memiliki *mean* sebesar 38,0507. Memiliki nilai minimum sebesar 20,00 dan nilai maksimum sebesar 66,67. Sedangkan nilai standar deviasinya sebesar 9,11417; (6) Variabel komite audit (KA) memiliki *mean* sebesar 66,0853. Memiliki nilai minimum sebesar 50,00 dan nilai maksimum sebesar 100,00. Sedangkan nilai standar deviasinya sebesar 8,26350.

Tabel 1
Deskriptif Statistik

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviasion
CETR	86	.015	38.298	9.12382	8.960423
ML	86	-.819	.595	.04306	.141118
CR	86	24.05	880.10	238.2024	165.94243
DER	86	6.81	370.10	84.0855	56.95660
KI	86	20.00	66.67	38.0507	9.11417
KA	86	50.00	100.00	66.0853	8.26350
Valid N (listwise)	86				

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 2
Uji Normalitas sebelum data outliers dibuang
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters ^{a,b}	.0000000	,0000000
	19.58719961	19,19213465
Most Extreme Differences	.154	,160
	.154	,160
	-.116	-,110
Test Statistic		.154
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019

Hasil pengujian menggunakan pendekatan *Kolmogorov-smirnov test* menunjukkan bahwa data pada tabel 2 tidak terdistribusi dengan normal, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan dibawah 0,05 yaitu 0,000. Menurut Ghozali (2016) menyatakan bahwa dasar pengambilan keputusan jika nilai signifikan > 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Dari tabel 2 menunjukkan bahwa data tersebut tidak lolos uji asumsi klasik yang terkait dengan uji normalitas maka hasil data tersebut perlu dilakukan *outliers*. *Outliers* digunakan untuk mengetahui apakah terdapat data yang menyimpang atau memiliki nilai ekstrim. Caranya adalah dengan menentukan nilai ambang batas yang dikategorikan sebagai data *outliers* dengan mengkonversi data ke dalam *standard score* atau Z-score dengan nilai rentang antara -1,96 dan +1,96. Berikut adalah data hasil *outliers*:

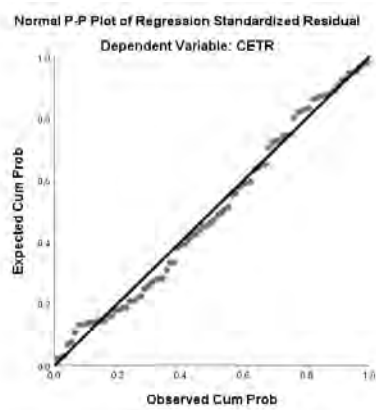
Berdasarkan uji *Kolmogorov-smirnov test* tabel 3 diketahui bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yang berarti data diatas telah terdistribusi secara normal dan dapat digunakan dalam penelitian.

Tabel 3
Uji Normalitas setelah data outliers dibuang
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		86
Normal Parameters ^{a,b}	.0000000 7.29034221	,0000000 7,05825945
Most Extreme Differences	.072 .072 -.060	,083 ,083 -,068
Test Statistic		.072
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019

Selain dengan pendekatan *Kolmogorov-smirnov test*, uji normalitas juga dapat digambarkan dengan menggunakan grafik *normal probability plot*. Cara untuk membaca normalitas dengan melihat grafik adalah dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari data. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka asumsi normalitas tersebut telah terpenuhi. Sebaliknya, jika data tidak menyebar bahkan jauh dari garis diagonal serta tidak mengikuti arah garis diagonal maka asumsi normalitas tidak terpenuhi. Dapat terlihat pada gambar 2:



Sumber: Data Sekunder diolah, 2019

Gambar 2
Grafik Normal Probability Plot

Uji Multikolinearitas

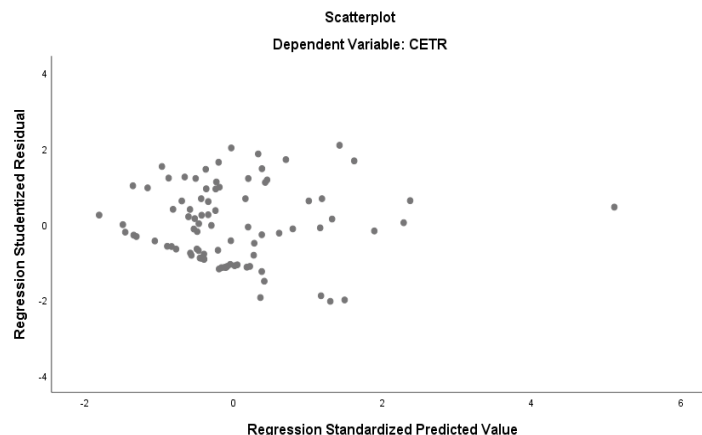
Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas
Collinearity Statistics

Model	Tolerance	VIF	Keterangan
ML	.979	1.021	Bebas Multikolinearitas
CR	.685	1.461	Bebas Multikolinearitas
DER	.725	1.380	Bebas Multikolinearitas
KI	.903	1.107	Bebas Multikolinearitas
KA	.795	1.257	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019

Sesuai hasil pengolahan data dalam tabel 4 menggambarkan bahwa tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10 maka dapat disimpulkan bahwa anatar variabel bebas (independen) diatas tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data Sekunder diolah 2019

Gambar 3
Grafik Scatterplot

Berdasarkan hasil pengolahan data pada gambar 3 terlihat bahwa pola penyebaran berada diatas dan dibawah dan diatas sumbu Y dan tidak membentuk sebuah pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini tidak terjadi gangguan heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin- Watson
1	.581 ^a	.338	.297	7.514713	1.222

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019

Hasil *output* pada tabel 5 dapat disimpulkan bahwa nilai DW adalah 1,222 berada diantara -2 dan +2 maka dapat disimpulkan bahwa data diatas ditidak terjadi autokorelasi.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 6
Persamaan Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	Constant)	-2.601	8.332	
	ML	-3.456	5.837	-.054
	CR	.004	.006	.082
	DER	.084	.017	.533
	KI	-.201	.094	-.205
	KA	.173	.111	.160

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019

Dari hasil analisis regresi linear berganda pada tabel 6 yang menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen. Maka dipeoleh persamaan sebagai berikut:

$$CETR = -2,601 - 3,456 ML + 0,004 CR + 0,084 DER - 0,201 KI + 0,173 KA + e$$

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 7
Perhitungan Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2306.908	5	461.382	8.170	.000 ^b
Residual	4517.673	80	56.471		
Total	6824.581	85			

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 7 didapatkan nilai F_{hitung} diperoleh sebesar 8,170 melalui tingkat signifikansi sebesar 0,000 karena probabilitas signifikan dibawah 0,05 maka dapat disimpulkan model diatas layak digunakan dalam penelitian. Dengan demikian model regresi diatas dapat memperkirakan penghindaran pajak yang digunakan oleh masing-masing model regresi secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel manajemen laba (ML), likuiditas (CR), *leverage* (DER), komisaris independen (KI), komite audit (KA) mampu menjelaskan penghindaran pajak (CETR).

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8
Nilai Adjusted R-Square
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.581 ^a	.338	.297	7.514713

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019

Hasil *output* pada tabel 8 dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,328. Hal ini berarti 29,7% variasi CETR dapat dijelaskan oleh variabel manajemen laba (ML), likuiditas (CR), *leverage* (DER), komisaris independen (KI), komite audit (KA). Sedangkan, sisanya 70,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian.

Uji Hipotesis (Uji t)

Tabel 9
Hasil Perhitungan Uji t
Coefficients^a

Model	t_{hitung}	Sig.	α	Keterangan
1 (Constant)	-.312	.756		
ML	-.592	.555	0,05	Tidak Berpengaruh
CR	.748	.457	0,05	Tidak Berpengaruh
DER	4.986	.000	0,05	Berpengaruh
KI	-2.141	.035	0,05	Berpengaruh
KA	1.564	.122	0,05	Tidak Berpengaruh

Sumber: Data Sekunder diolah, 2019

Pembahasan

Pengaruh Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak.

Sebuah perusahaan yang fokus utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam kegiatan operasionalnya, selalu berusaha untuk melakukan efisiensi secara

maksimal, utamanya pada efisiensi biaya. Salah satu efisiensi biaya yang dilakukan adalah efisiensi biaya terhadap pembayaran pajak. Salah satu caranya adalah dengan melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak inilah yang memicu tindakan penghindaran pajak oleh manajemen perusahaan. Efisiensi biaya yang dilakukan sebagian besar perusahaan melakukan dengan *income decreasing*. Hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -0,592 dengan nilai signifikansi sebesar 0,555 yang mana nilai ini lebih tinggi dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama ditolak, maka manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil diatas tidak mendukung hipotesis yang telah diajukan.

Kebanyakan perusahaan melakukan manajemen laba dengan strategi *income decreasing* atau yang lebih dikenal dengan pola *income maximization* yang dilakukan adalah dengan membuat biaya penyusutan aset tetap pada tahun berjalan lebih besar dibandingkan, sehingga umur ekonomis diperpendek. Perubahan ini secara langsung mempengaruhi laba operasional tahun berjalan lebih rendah dari laba sesungguhnya (Suliyanto, 2008). Selain itu, menurut Martiani (2012) pengakuan pendapatan dan beban tidak sama antara ketentuan UU PPh dengan PSAK. Contohnya, adanya perbedaan masa manfaat aset tetap antara ketentuan pajak dan kebijakan entitas dalam perhitungan penyusutan. Hal ini menyebabkan nilai buku aset dalam laporan posisi keuangan dengan pengenaan pajaknya berbeda, diakibatkan perbedaan nilai penyusutannya. Pada akhir periode entitas selalu melakukan koreksi fiskal atas laba sebelum menghitung jumlah penghasilan kena pajak.

Sehingga meskipun perusahaan melakukan *income decreasing*, tidak berakibat pada tujuan meminimalkan pajak, karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan operasional dan pendapatan fiskal. Sehingga laba operasional tidak mempengaruhi tingkat agresivitas pajak. Selain itu, strategi *income decreasing* akan memberikan dampak buruk terhadap respon investor dimasa depan utamanya untuk perusahaan *go public* karena laba yang diperoleh kecil sehingga keuntungan yang didapatkan nanti juga akan kecil. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2014) yang menyatakan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Minimalisasi laba dengan tujuan pajak seringkali bertentangan dengan adanya tekanan untuk menaikkan laba. Hal ini cenderung terjadi pada perusahaan terbuka (*go public*), bagi perusahaan yang belum mencapai target dalam menghasilkan laba, penurunan laba untuk penghematan pajak sangat dihindari karena hal ini akan berdampak pada respon investor pada perusahaan.

Namun, hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan Novitasari (2017) yang menyatakan jika semakin tinggi *income decreasing* maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajaknya. Serta penelitian, Suyanto dan Supramono (2012) yang menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan serta selama periode pengamatan ada kecenderungan bahwa perusahaan melakukan *income decreasing* sebagai upaya untuk melakukan penghindaran pajak.

Pengaruh Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan hasil uji t diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,748 dengan tingkat signifikan sebesar 0,457 yang mana nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, walaupun hasilnya bernilai positif (searah) yang menggambarkan semakin tinggi likuiditas maka akan semakin tinggi pula tindakan penghindaran pajak yang akan dilakukan perusahaan. Ketidaksignifikan ini disebabkan oleh tingkat likuiditas perusahaan sektor properti dan *real estate* relatif sama. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis deskriptif dimana nilai standar deviasi 165,94 dengan nilai rata-rata 238,20 lebih rendah. Perbandingan inilah, yang mengindikasikan bahwa tingkat likuiditas perusahaan sektor properti dan *real estate* relatif sama.

Sebuah perusahaan yang memiliki tingkat rasio likuiditas yang tinggi menggambarkan tingginya kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya serta

tingginya uang tunai yang menganggur sehingga tidak produktif. Sebaliknya, jika likuiditasnya rendah maka akan berdampak pada pinjaman modal yang akan diberikan kreditur ataupun investor pada perusahaan akan turun karena ketidakpercayaan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman. Sehingga, perusahaan akan menjaga tingkat likuiditasnya agar dapat memenuhi kewajiban jangka pendek dan mendapat kepercayaan oleh penyedia dana. Jadi, tidak dimungkinkan perusahaan akan melakukan penghindaran pajak. Hal ini, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fikriyah (2014) dan Suyanto dan Supramomo (2012) yang menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

Untuk hasil penelitian *leverage* yang diprosikan dengan DER, diperoleh hasil uji t diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 4,986 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan. Hasil yang positif menandakan bahwa hubungan *leverage* dengan penghindaran pajak searah. Semakin tinggi utang perusahaan dalam mendapatkan pinjaman untuk kegiatan operasionalnya, sehingga beban bunga yang akan ditanggung juga besar, sehingga beban bunga ini akan berpengaruh terhadap beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Pengaruhnya adalah beban pajak yang ditanggung menjadi semakin berkurang. Sehingga perusahaan akan lebih memilih untuk menggunakan pendanaan yang berasal dari utang agar beban pajak yang dibayarkan tidak terlalu banyak mengurangi keuntungan yang didapatkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan dengan Adelina (2012), Prakosa (2014) dan Ozkan (2001) menyatakan bahwa adanya pengaruh positif dengan penghindaran pajak. Sehingga dapat disimpulkan perusahaan lebih memilih untuk berutang untuk mengurangi beban pajaknya.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji statistik menyatakan bahwa hasil uji t didapatkan nilai t_{hitung} sebesar -2,141 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,035 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Hasil ini menyatakan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sehingga hasil ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Dalam sebuah perusahaan keberadaan komisaris independen menjadi hal penting. Hal ini dikarenakan, komisaris independen sebagai pengawas dan pengendali dalam perusahaan yang dituntut untuk selalu independen (tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi ataupun dewan komisaris lainnya).

Tujuan dibentuknya komisaris independen adalah untuk mengawasi manajemen dalam menentukan kebijakan-kebijakan serta menyeimbangkan keputusan kebijakan tersebut agar tidak terjadi konflik kepentingan. Selain itu, sebagai pengawas manajemen untuk menentukan kebijakan akuntansi dalam hal pertumbuhan laba. Jika proporsi komisaris independen banyak atau besar maka diharapkan perusahaan tersebut semakin tidak melakukan penghindaran pajak. Hasil di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan Diantari dan Ulupui (2016) yang menyatakan adanya hubungan negatif komisaris independen dengan penghindaran pajak. Ini berarti keberadaan komisaris independen efektif dalam upaya memperkecil tingkat penghindaran pajaknya.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Komite audit dalam perusahaan juga memiliki peran yang sangat penting, karena komite audit bertanggung jawab dalam membantu tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit bertugas melakukan pengawasan kepada para auditor baik auditor internal maupun eksternal dalam memperbaiki kelemahan ataupun ketidakpatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Sehingga dengan adanya komite audit dapat meminimalkan kecurangan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan hasil peneliti, didapatkan nilai t_{hitung} sama dengan 1,564 dengan tingkat signifikansi senilai 0,122 yang mana nilai tersebut lebih tinggi dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, walaupun hasilnya positif yang mana jika komite audit semakin banyak, maka perusahaan semakin tidak transparan, dan penghindaran pajak bisa terjadi. Namun, hasil yang tidak signifikan menunjukkan bahwa banyak sedikitnya komite audit juga tidak mempengaruhi tingkat penghindaran pajak.

Keberadaan komite audit dalam mekanisme tata kelola perusahaan yang kurang berperan aktif dalam penetapan kebijakan terkait besaran tarif pajak yang efektif perusahaan serta permasalahan yang terjadi dalam penyusunan laporan keuangan yang tidak transparan dan belum menemukan solusi dalam penyelesaiannya. Sehingga komite audit lebih cenderung untuk menjalankan tugasnya secara netral dan tepat berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan. Sehingga komite audit belum menjalankan tugasnya dengan efisien. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Prakosa (2014) ditemukan bahwa komite audit tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Namun hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan Hasil penelitian Wibawa *et al.* (2016) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan properti dan *real estate*. Hal ini menggambarkan bahwa tindakan meminimalisasi laba tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku untuk menghindari pembayaran pajak sesuai ketentuan. Hal ini dimungkinkan adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara UUPPh dengan PSAK. Sebagai contoh perbedaan masa manfaat aset tetap dalam perhitungan penyusutan, menyebabkan perbedaan nilai penyusutan, hal ini mengakibatkan nilai buku aset dalam laporan posisi keuangan dengan tarif pajaknya berbeda. Selain itu, strategi *income decreasing* yang dilakukan oleh perusahaan *go public* utamanya akan mempengaruhi respon investor terhadap perusahaan karena laba yang diperoleh kecil sehingga keuntungan yang di dapat oleh investor kecil. Sehingga strategi *income decreasing* kurang tepat dilakukan oleh perusahaan *go public* dalam hal tujuan minimalisasi beban pajaknya. Hal berarti meskipun adanya *income decreasing* namun tidak berdampak pada tujuan minimalisasi pajaknya.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel likuiditas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dimana hal ini menggambarkan bahwa semakin tinggi presentase rasio likuiditas sebuah perusahaan, maka semakin besar nilai CETRnya artinya bahwa tindakan penghindaran pajak kecil. Hal ini dimungkinkan karena perusahaan akan lebih menjaga likuiditasnya daripada melakukan penghindaran pajak. Karena bila perusahaan likuiditasnya tinggi maka perusahaan akan mampu membayar utang jangka pendeknya termasuk utang pajaknya, sehingga investor akan percaya perusahaan jika diberikan pinjaman akan membayar.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menggambarkan bahwa makin tinggi rasio *leverage* atau semakin tinggi perusahaan melakukan utang, maka semakin tinggi pula tindakan penghindaran pajaknya. Perusahaan akan memilih melakukan utang kepada pihak luar karena dengan utang maka akan mendapatkan beban bunga tinggi, dengan beban bunga inilah perusahaan akan melakukan penghindaran pajak karena beban bunga yang tinggi akan mengurangi beban pajaknya.

Berdasarkan uji hipotesis menggambarkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menggambarkan bahwa semakin banyak

komisaris independen maka semakin efektif kinerjanya dalam mengawasi manajemen dalam membuat kebijakan. Sehingga dengan demikian tindakan penghindaran pajak dapat diminimalisir.

Berdasarkan uji hipotesis menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menggambarkan bahwa semakin banyak komite audit maka semakin tidak transparan kinerja komite audit sehingga tindakan penghindaran semakin tinggi. Hal ini dimungkinkan karena terbatasnya tanggung jawab komite audit dalam peran menetapkan besarnya tarif efektif pajak dalam perusahaan serta permasalahan laporan keuangan yang kurang transparan dan belum menemukan solusi tepat bagi permasalahan tersebut. Sehingga komite audit belum menjalankan tugasnya dengan efisien.

Saran

Penelitian ini telah berusaha mengembangkan penelitian terdahulu. Namun masih terdapat beberapa keterbatasan penelitian yang dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut: **Pertama**, dalam penelitian mengenai penghindaran pajak, masih terdapat variabel yang belum banyak digunakan dan memiliki kontribusi yang besar dalam mempengaruhi penghindaran pajak. Dari hasil penelitian ini dengan melihat latar belakang penelitian, manfaat penelitian dan teori yang mendukung, dapat disampaikan bahwa nilai R^2 adalah 32,8% variasi variabel independen dalam menjelaskan keterkaitannya dengan variabel dependen. Sedangkan sisanya 67,2% dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian ini. **Kedua**, ruang lingkup penelitian ini hanya menggunakan sampel dari perusahaan sektor properti dan *real estate*.

Selain terdapat keterbatasan, peneliti juga memberikan saran bagi peneliti selanjutnya yaitu **Pertama**, penelitian ini hanya menggunakan sampel pada perusahaan sektor properti dan *real estate*. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya, dapat menggunakan perusahaan-perusahaan disektor lain, sehingga memberikan tingkat generalisasi yang lebih tinggi dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. **Kedua**, penelitian ini hanya menggunakan variabel manajemen laba, likuiditas, *leverage* dan *corporate governance* sebagai variabel yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Sebaiknya, untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan indikator lain yang memiliki kaitan lebih erat dengan penghindaran pajak. **Ketiga**, dalam penelitian ini periode yang digunakan 5 tahun. Untuk peneliti selanjutnya akan lebih baik jika menggunakan periode yang lebih panjang dikarenakan periode yang lama akan memberikan hasil yang mendekati sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, T. 2012. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak di Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Ariawan, I. M. A. R. dan P. E. Setiawan. 2017. Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 18(3): 1831-1859.
- Budiman, J. dan Setiyono. 2012. Pengaruh Karakteristik Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*. 25-28 September.
- Cinthya, C. N. dan M. Indriani. 2015. Arus Kas, Komite Audit dan Manajemen Laba Studi Kausalitas pada Perusahaan Manufaktur Indonesia. *Jurnal Dinamika dan Akuntansi Bisnis*, 2(2): 167-183.
- Damayanti, F. dan T. Susanto. 2015. Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return On Asset terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 5(2):187-206.

- Dharma, S. I. M. dan P. A. Ardiana. 2016. Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 15(1): 584-613.
- Diantari, P. R. dan I. G. K. A. Ulupui. 2016. Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen dan Proporsi Kepemilikan Intitusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 16(1): 702-732.
- Dechow, P. M., R. G. Sloan, dan A. P. Sweeney. 1995. Detecting Earnings Management. *The Accounting Review* 77(2): 193-225.
- Detik Finance. 2013. Sanksi Siap Menanti Pengembang yang Terbukti Hindari Pajak Properti. <https://finance.detik.com/>. Diakses tanggal 13 Agustus 2018.
- Dewinta, I. A. R. dan P. E. Setiawan. 2016. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 14(3): 1584-1613.
- Dyreg, S. D., H. Michelle, dan E. L. Maydew. 2008. Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review* 83: 61-82.
- Effendi, M. A. 2016. *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Edisi Dua. Salemba Empat. Jakarta.
- Fahriani, M. dan M. P. Priyadi. 2016. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5(7).
- Fikriyah. 2014. Analisis Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas dan Karakteristik Kepemilikan terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2010-2012). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia. 2001. *Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan*. Edisi Kedua. Prentice Hall. Jakarta.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi kedelapan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi ketujuh. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hanafi, M. M. dan A. Halim. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Hanafi, U. dan P. Harto. 2014. Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting* 3(2): 1-11.
- Hanggraeni, D. 2014. *Manajemen Risiko Perusahaan Terintegrasi (Enterprise Risk Management) dan Good Corporate Governance*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- _____. 2015. *Manajemen Risiko Perusahaan (Enterprise Risk Management) dan Good Corporate Governance*. UI Press. Jakarta.
- Harahap, S. S. 2010. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hidayati, N. dan Fidiana. 2017. Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah dan Riset Akuntansi* 6(3): 1053-1070.
- Hidayat, W. W. 2017. The Influence of Size, Return on Equity, and Leverage on the disclosure of the Corporate Social Responsibility (CSR) in Manufacturing Companies. *International Journal of Education and Research* 5(8).
- Husnaini, W., Y. Maesarah, dan S. Atikah. 2013. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak. <http://multiparadigma.lecture.ub.ac.id/files/2015/05/KRA2-PPJK011.pdf>. Diakses tanggal 27 November 2015.

- Indrawan, Y. 2016. Pengaruh Good Corporate Governance dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2014. *Skripsi*. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Marfirah, D. dan F. Syam BZ. 2016. Pengaruh Corporate Governance dan Leverage Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2011-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 1(2): 91-102.
- Martani, D. 2012. Akuntansi Pajak Penghasilan. <http://staff.blog.ui.ac.id/martani/pendidikan/artikel/akuntansi-pph>. Diakses tanggal 10 Januari 2014.
- Novitasari, S. 2017. Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, dan Intesitas Modal terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2010-2014). *JOM Fekon*, 4(1).
- Ozkan, A. N. 2001. Corporate Cash Holdings: An Empirical Investigation of UK Companies. *Journal of Banking and Finance*: 2103-2134.
- Prakosa. 2014. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*. 22-27 September: 1-27.
- Priantara, D. 2013. *Fraud Auditing & Investigation*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Putri, L. Y .P. 2014. Pengaruh Likuiditas, Manajemen Laba dan Corporate Governance terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang* 2(1).
- Rosalia, Y. 2017. Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6(3): 890-908.
- Santoso, S. 2009. *Panduan Lengkap Menguasai Statistik dengan SPSS 17*. Elex Media Kompatindo. Jakarta.
- Saputra, M. D. R. dan N. F. Asyik. 2017. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah dan Riset Akuntansi* 6(8): 2-18.
- Scott, W. R. 2012. *Financial Accounting Theory*. Pearson. USA.
- Septiarini, K. D. 2017. Pengaruh ROA, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Silvia, Y. S. 2017. Pengaruh Manajemen Laba, Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Equity* 3(4).
- Swingly, C. dan I. M. Sukartha. 2015. Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 10(1): 47-62.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Suliyanto, S. 2008. *Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris*. PT. Grasindo. Jakarta.
- Sutrisno. 2009. *Manajemen Keuangan Teori Konsep dan Aplikasi*. Cetakan Ketujuh. Ekonisia. Yogyakarta.
- Suyanto, K. D. dan Supramono. 2012. Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 2(16): 167-177.
- Tandean, V. A. 2014. Pengaruh Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Paper di presentasikan Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call for Papers Unisbank (Sendi_U)* 978-979.
- Wibawa, A., Wilopo, dan Y. Abdillah. 2016. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Terdaftar di Indeks Bursa SRI KEHATI Tahun 2010-2014). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 11(1).
- Xynas, L. 2011. Tax Planning, Avoidance and Evasion in Australian 1970-2010. *The Regulatory Responses and Taxpayer Compliance, Revenue Law Journal*, 20-1.

Yoehana, M. 2013. Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.